

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali Zainuddin, 2009, *“Metode Penelitian Hukum”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashiddiqie Jimly, 2007, *“Hukum Tata Negara Darurat”*, Edisi ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2010, *“Hukum Acara Pengujian Undang-Undang”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Daulay Ikhsan Rosyada Parluhutan, 2006, *“Mahkamah Konstitusi- Memahami Keberadaannya Dalam Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia”*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Farida Indrati Soeprapto Maria, 1998, *“Ilmu perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya”*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mahfud MD Moh., 2006, *“Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi”*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Manan Bagir, 1999, *“lembaga Kepresidenan”*, Pusat Studi FH UII Kerjasama Dengan Gama Media, Yogyakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2004 *“Hukum Dan Penelitian Hukum”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Palguna I Dewa Gede, 2013, *“PENGADUAN KONTITUSIONAL (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara”*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sekretariat Jenderal MPR R.I., 2003, *“Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*, Sekretariat Jenderal MPR R.I., Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1985, *“Penelitian Hukum Normatif- Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali, Jakarta.
- Soemitro Hanitijo Ronny, 1983, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, Ghalia, Jakarta.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *“Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Jurnal :

Huda Ni'matul, Oktober 2010, "*Pengujian Perpu Oleh Mahkamah Konstitusi*", Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

K. Wardaya Manunggal., April 2010, "*Perubahan Konstitusi Melalui Putusan MK*", Jurnal Konstitusi Volume 7, Nomor 2, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Lotulung Paulus Effendi, 1999/2000. "*Lapran Akhir Dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Mahkamah Agung dalam Melaksanakan Hak uji Materil (judicial review)*", Badan Pembinaan Hukum Departemen Hukum Perundang-Undangan Republik Indonesia, Jakarta.

Muldiana, 2013, "*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*", Skripsi: Fakultas Hukum Unhas, Makassar.

Nazriyah Riri, Juli 2010, "*Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*", Jurnal Hukum Volume 17, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Simamora Janpatar, Februari 2010, "*Multitafsir Pengertian Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penerbitan Perpu*", Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 1.

Siallagan Haposan, 2010, "*Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang*", Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta.

Sutiyoso Bambang, Desember 2010, "*Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*", Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

Putusan :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang pengujian Perpu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-VIII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK);

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang

Internet :

Files Putusan Ditjenpp Kemenkumham, diakses pada 26 Juli 2014.

Alamat website:

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/litigasi/Putusan%20PUU%20138-2009%20KPK.pdf>;

“Mahfud MD: Perpu MK Tak Bisa Diuji Materi”. Republika, diakses pada 24 Februari 2014.

Alamat website:

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/10/24/mv5ddy-mahfud-md-perpu-mk-tak-bisa-diuji-materi>;

“Perpu MK digugat”. Jurnas, diakses pada 7 Februari 2014.

Alamat website:

<http://www.jurnas.com/news/111427/Perpu-MK-Digugat-2013/1/Nasional/Hukum>;

“Perpu No 1 Tahun 2013 Bertentangan Dengan UUD 1945”. Tribunnews, diakses pada 7 Februari 2014.

Alamat website:

<http://www.tribunnews.com/nasional/2013/10/19/perpu-no-1-tahun-2013-bertentangan-dengan-uud-1945>;

“Praktik Legislative Review dan Judicial Review di Indonesia”, Hukumonline, diakses pada 12 Mei 2014.

Alamat website:

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1105/praktik-legislative-review-dan-judicial-review-di-indonesia>;

Reza Fikri Febriansyah, 2009, *“Eksistensi dan Prospek Pengaturan Perpu Dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia”*, diakses pada 10 Mei 2014.

Alamat Website:

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/75-eksistensi-dan-prospek-pengaturan-perpu-dalam-sistem-norma-hukum-negara-republik-indonesia.html>;

“Saldi Isra: MK Berwenang Uji Perpu”. Jurnas, diakses pada 7 Februari 2014.

Alamat website:

<http://www.jurnas.com/news/111669/Saldi-Isra-MK-Berwenang-Uji-Perpu-2013/1/Nasional/Hukum>;

“Yusril MK Tak Berwenang Uji Perpu”. Vivanews, diakses pada 7 Februari 2014.

Alamat website:

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/453041-yusril--mk-tak-berwenang-uji-perpu>;

“Yusril: MK tidak Bisa Uji Perpu”. Metrotvnews, diakses pada 12 Januari 2014.

Alamat website:

<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/22/1/189695/Yusril-MK-tidak-Bisa-Uji-Perpu;>

“Yusril Sarankan DPR Gugat MK Soal Perpu”. Republika, diakses pada 24 Februari 2014.

Alamat website:

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/10/24/mv5sab-yusril-sarankan-dpr-gugat-mk-soal-perpu;>

“Yusril Uji Materi Perpu MK Kacaukan Sistem Ketatanegaraan”, Liputan6, diakses pada 25 Juli 2014.

Alamat website:

<http://news.liputan6.com/read/751057/yusril-uji-materi-perppu-mk-kacaukan-sistem-ketatanegaraan.>

